

Strategi Pengembangan Ilmu Manajemen Pemerintahan Berbasis Budaya Oriental melalui Pendekatan SMART Governance di Indonesia

Didi Sukardi^a

^{a.)} Prodi Manajemen, Universitas Satyagama, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Email: di_sukardi@yahoo.com

ABSTRACT

The development of globalization, digital transformation, and the increasing demands for quality public services have encouraged the need for innovation in government management systems in Indonesia. This study aims to analyze strategies for developing government management science based on oriental culture through the SMART Governance approach. The research uses a descriptive qualitative method with a literature study approach from various scientific journals, books, and policy documents related to governance, oriental culture, and digital government. The findings show that oriental cultural values such as morality, harmony, responsibility, mutual cooperation, and deliberation have strategic relevance in strengthening modern governance. Through SMART Governance, government management can be developed into a governance system that is adaptive, transparent, technology-based, and humanistic. In addition, SMART culture consisting of Self Driven, Motivation, Action, Responsible Regulation, and Team Accupants supports the creation of professional, collaborative, and integrity-based governance. However, the implementation of SMART Governance still faces challenges, including bureaucratic resistance, digital inequality, weak institutional integration, and limited human resource capacity. Therefore, strengthening organizational culture, digital transformation, and adaptive leadership are essential to realizing sustainable modern governance in Indonesia.

Keywords: Government Management; Oriental Culture; SMART Governance; Digital Transformation; Public Service

ABSTRAK

Perkembangan globalisasi, transformasi digital, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik mendorong perlunya inovasi dalam sistem manajemen pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan berbasis budaya oriental melalui pendekatan SMART Governance. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan terkait tata kelola pemerintahan, budaya oriental, dan pemerintahan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya oriental seperti moralitas, harmoni, tanggung jawab, gotong royong, dan musyawarah memiliki relevansi strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan modern. Melalui pendekatan SMART Governance, manajemen pemerintahan dapat dikembangkan menjadi sistem pemerintahan yang adaptif, transparan, berbasis teknologi, dan humanis. Selain itu, budaya SMART yang terdiri atas Self Driven, Motivation, Action, Responsible Regulation, dan Team Accupants mendukung terciptanya birokrasi yang profesional, kolaboratif, dan berintegritas. Namun, implementasi SMART Governance masih menghadapi tantangan berupa resistensi birokrasi, kesenjangan digital, lemahnya integrasi kelembagaan, serta keterbatasan sumber daya manusia aparatur negara. Oleh karena itu, penguatan budaya organisasi, transformasi digital, dan kepemimpinan adaptif menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan modern yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Manajemen Pemerintahan; Budaya Oriental; SMART Governance; Transformasi Digital; Pelayanan Publik

Citation:

Sukardi, D. (2026). Strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan berbasis budaya oriental melalui pendekatan SMART governance di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen*, 10(1), 181–196.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi, revolusi industri 4.0, transformasi digital, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik telah membawa perubahan besar terhadap sistem tata kelola pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi negara, tetapi juga sebagai aktor strategis yang menentukan efektivitas pelayanan publik, transparansi birokrasi, efisiensi kebijakan, serta keberhasilan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, ilmu manajemen pemerintahan memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan digital yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik global. (Syafie, I. K, 2017).

Saat ini, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, lemahnya integrasi sistem pemerintahan digital, tumpang tindih regulasi, birokrasi yang lambat, rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur, serta lemahnya integritas dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, perkembangan masyarakat digital menuntut pemerintah untuk mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan berbasis teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan pengembangan ilmu manajemen pemerintahan menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman. (Dwiyanto, A, 2021).

Dalam konteks pemerintahan modern, konsep SMART Governance hadir sebagai pendekatan strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital, integrasi sistem informasi, inovasi pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas birokrasi. SMART Governance tidak hanya menekankan aspek digitalisasi pemerintahan, tetapi juga pembangunan sistem pemerintahan yang cerdas, responsif, dan berorientasi pada efektivitas pelayanan publik. Pendekatan ini menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pembangunan pemerintahan yang modern dan berdaya saing di era digital. (World Bank, 1992).

Namun demikian, implementasi SMART Governance tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan modernisasi birokrasi semata. Transformasi pemerintahan juga membutuhkan penguatan nilai budaya, etika, moralitas, dan karakter aparatur negara agar digitalisasi pemerintahan tidak kehilangan orientasi pada kepentingan publik. Modernisasi birokrasi yang hanya berorientasi pada efisiensi administratif tanpa diimbangi pembangunan budaya organisasi dan integritas aparatur berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kualitas pelayanan publik, lemahnya etika birokrasi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan ilmu manajemen pemerintahan perlu dikaitkan dengan budaya oriental sebagai fondasi moral dan etika dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. (Effendi, S, 2019).

Budaya oriental merupakan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat Timur yang menekankan moralitas, loyalitas, harmoni sosial, gotong royong, etika kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab kolektif, serta musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-

nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks pemerintahan modern, budaya oriental tidak hanya dipahami sebagai nilai tradisional, tetapi juga sebagai pendekatan strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang humanis, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Koentjaraningrat, 2009).

Dalam penelitian ini, budaya oriental dikembangkan melalui konsep budaya SMART yang terdiri atas Self Driven, Motivation, Action, Responsible Regulation, dan Team Accountants. Konsep SMART menjadi pendekatan budaya organisasi pemerintahan yang menekankan pentingnya aparatur negara memiliki kesadaran diri, motivasi kerja yang tinggi, kemampuan bertindak cepat dan tepat, kepatuhan terhadap regulasi yang bertanggung jawab, serta kemampuan bekerja sama secara kolektif dalam organisasi pemerintahan. Self Driven mencerminkan kemampuan aparatur untuk memiliki inisiatif, disiplin, dan tanggung jawab pribadi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Motivation berkaitan dengan dorongan internal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi. Action menekankan pentingnya tindakan nyata dan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Responsible Regulation menunjukkan bahwa setiap kebijakan dan regulasi harus dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai prinsip hukum. Sementara itu, Team Accountants menekankan pentingnya kolaborasi, koordinasi, dan akuntabilitas kolektif dalam tata kelola pemerintahan modern.

Konsep budaya SMART tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pendekatan SMART Governance dalam pemerintahan modern. SMART Governance membutuhkan aparatur negara yang tidak hanya menguasai teknologi digital, tetapi juga memiliki budaya kerja yang profesional, adaptif, inovatif, dan berintegritas. Dengan demikian, integrasi budaya oriental melalui budaya SMART dapat memperkuat implementasi SMART Governance di Indonesia, khususnya dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pendekatan ini juga dapat memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat melalui prinsip kepercayaan, tanggung jawab sosial, partisipasi publik, dan kepentingan bersama dalam pembangunan nasional. (Pasolong, H, 2020).

Namun demikian, penerapan SMART Governance di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital aparatur negara, kesenjangan infrastruktur teknologi, resistensi birokrasi terhadap perubahan, lemahnya integrasi data pemerintahan, serta belum optimalnya pembangunan budaya organisasi pemerintahan. Reformasi birokrasi selama ini cenderung lebih fokus pada digitalisasi pelayanan publik dan efisiensi administratif, sementara pembangunan karakter aparatur negara dan internalisasi nilai budaya pemerintahan masih belum menjadi perhatian utama. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai persoalan birokrasi dan pelayanan publik masih terus terjadi di Indonesia. (Sedarmayanti, 2018).

Di sisi lain, masyarakat modern menuntut sistem pemerintahan yang cepat, transparan, inovatif, dan berbasis teknologi digital. Pemerintahan yang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan yang tidak hanya berbasis

modernisasi teknologi, tetapi juga berorientasi pada penguatan budaya oriental melalui budaya SMART sebagai fondasi moral dan etika dalam tata kelola pemerintahan. (Mahmudi, 2015).

Dalam konteks tersebut, strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan berbasis budaya oriental melalui pendekatan SMART Governance menjadi sangat penting. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih humanis, profesional, adaptif, inovatif, transparan, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern di era digital. Selain itu, integrasi budaya oriental dan budaya SMART dalam SMART Governance juga dapat memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan efektivitas birokrasi, serta membangun hubungan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. (Wasistiono, S, 2021).

Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada masih terbatasnya kajian akademik yang menghubungkan budaya oriental dan budaya SMART dengan pengembangan ilmu manajemen pemerintahan melalui pendekatan SMART Governance di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek digital governance, reformasi birokrasi, dan implementasi teknologi pemerintahan, sedangkan dimensi budaya oriental sebagai strategi penguatan tata kelola pemerintahan modern masih relatif jarang dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Strategi Pengembangan Ilmu Manajemen Pemerintahan Berbasis Budaya Oriental melalui Pendekatan SMART Governance di Indonesia” menjadi penting untuk dilakukan guna menghasilkan konsep dan strategi tata kelola pemerintahan yang mampu mengintegrasikan modernisasi teknologi dengan nilai budaya bangsa dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, humanis, dan berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR

Perkembangan globalisasi, transformasi ekonomi digital, serta dinamika geopolitik internasional telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem tata kelola pemerintahan dan stabilitas kegiatan usaha di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah tidak lagi hanya berfungsi sebagai regulator administratif, tetapi juga sebagai aktor strategis yang menentukan kepastian hukum, stabilitas ekonomi, keberlanjutan investasi, serta perlindungan terhadap dunia usaha nasional. Dalam konteks tersebut, ilmu manajemen pemerintahan memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan global guna mendukung stabilitas kegiatan usaha secara berkelanjutan. (Hardjosoekarto, S, 2014).

Beberapa studi literatur menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan memiliki hubungan yang erat dengan stabilitas kegiatan usaha dan pembangunan ekonomi nasional. Penelitian yang dilakukan oleh World Bank menjelaskan bahwa pemerintahan yang efektif dan akuntabel mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum, efektivitas birokrasi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan ilmu manajemen pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan administrasi negara, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, penelitian oleh Transparency International menegaskan bahwa lemahnya integritas birokrasi dan tingginya tingkat korupsi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat stabilitas

kegiatan usaha di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingginya praktik korupsi menyebabkan ketidakpastian regulasi, meningkatnya biaya ekonomi, serta menurunnya kepercayaan investor terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan penguatan etika pemerintahan menjadi bagian penting dalam pengembangan ilmu manajemen pemerintahan modern.

Dalam konteks pemerintahan modern, konsep good governance menjadi paradigma utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif. Penelitian oleh United Nations Development Programme menjelaskan bahwa prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip good governance akan lebih mudah menciptakan lingkungan usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Di sisi lain, perkembangan reformasi birokrasi dan digital governance juga mempengaruhi pola pengelolaan pemerintahan di berbagai negara. Penelitian oleh Sadu Wasistiono menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan modern mengalami perkembangan dari pendekatan klasik menuju tata kelola pemerintahan kontemporer yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan inovasi birokrasi. Namun demikian, modernisasi birokrasi tidak hanya membutuhkan pendekatan administratif dan teknologi, tetapi juga memerlukan penguatan budaya organisasi dan etika pemerintahan agar reformasi birokrasi dapat berjalan secara efektif. (Koentjaraningrat, 2009)

Dalam konteks tersebut, budaya oriental menjadi salah satu pendekatan penting dalam pengembangan ilmu manajemen pemerintahan di Indonesia. Budaya oriental menekankan nilai-nilai moralitas, harmoni sosial, loyalitas, gotong royong, musyawarah, serta tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan falsafah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penelitian mengenai budaya organisasi pemerintahan menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi dan teknologi birokrasi, tetapi juga oleh nilai budaya yang membentuk perilaku aparatur negara. Budaya oriental dalam pemerintahan dipandang mampu menciptakan sistem birokrasi yang lebih humanis, etis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini memperkuat pentingnya internalisasi nilai budaya bangsa dalam pengembangan ilmu manajemen pemerintahan modern. (Mahmudi, 2015)

Selain itu, penelitian terkait stabilitas kegiatan usaha menunjukkan bahwa dunia usaha membutuhkan dukungan tata kelola pemerintahan yang mampu menciptakan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, efektivitas pelayanan publik, serta keamanan investasi. Pemerintahan yang tidak stabil dan birokrasi yang tidak efektif dapat menyebabkan menurunnya daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan harus diarahkan pada pembangunan sistem pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Dalam perspektif yang lebih luas, berbagai penelitian juga menekankan pentingnya keseimbangan antara modernisasi birokrasi dan penguatan nilai budaya lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan pemerintahan berbasis budaya dipandang mampu memperkuat legitimasi kebijakan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan pelaku usaha. Pendekatan tersebut diyakini dapat mendukung

terciptanya stabilitas kegiatan usaha dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. (Mardiasmo, 2018)

Dari beberapa penelitian dan artikel jurnal tersebut di atas, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan berbasis budaya oriental dalam mewujudkan stabilitas kegiatan usaha di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek good governance, reformasi birokrasi, dan kebijakan ekonomi secara umum, sedangkan dimensi budaya oriental sebagai strategi penguatan tata kelola pemerintahan masih relatif terbatas dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan ilmiah (research gap) dengan mengkaji bagaimana pengembangan ilmu manajemen pemerintahan berbasis budaya oriental dapat menjadi strategi dalam menciptakan stabilitas kegiatan usaha dan penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Ilmu Manajemen Pemerintahan

Secara Ilmu manajemen pemerintahan merupakan cabang ilmu yang mempelajari proses pengelolaan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam perspektif administrasi publik modern, manajemen pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan aspek birokrasi administratif, tetapi juga mencakup pengelolaan kebijakan publik, pelayanan masyarakat, penguatan kelembagaan, kepemimpinan, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Menurut Sadu Wasistiono, perkembangan ilmu pemerintahan mengalami transformasi dari pendekatan klasik menuju pendekatan kontemporer yang menekankan pentingnya good governance, inovasi birokrasi, dan digitalisasi pemerintahan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Ilmu manajemen pemerintahan pada era modern dipandang sebagai instrumen strategis dalam menciptakan pemerintahan yang profesional, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. (Ndraha, T, 2011)

Dalam konteks Indonesia, ilmu manajemen pemerintahan memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan filosofis penyelenggaraan negara. Pemerintahan tidak hanya diposisikan sebagai sistem administratif, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, pengembangan ilmu manajemen pemerintahan harus mampu mengintegrasikan modernisasi birokrasi dengan nilai budaya dan karakter bangsa Indonesia.

Budaya Oriental dalam Tata Kelola Pemerintahan

Budaya oriental merupakan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat Timur yang menekankan harmoni sosial, moralitas, loyalitas, kolektivitas, penghormatan terhadap etika, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perspektif pemerintahan, budaya oriental menjadi fondasi moral yang membentuk karakter kepemimpinan, pola hubungan sosial, dan orientasi pelayanan publik. Budaya oriental memiliki relevansi yang kuat dalam sistem pemerintahan Indonesia karena nilai-nilainya selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti gotong royong, musyawarah mufakat, keadilan sosial, dan persatuan nasional. Nilai budaya oriental

juga menekankan pentingnya etika kepemimpinan, integritas aparatur negara, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. (Pasolong, H, 2020)

Menurut kajian administrasi publik modern, keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh sistem regulasi dan teknologi birokrasi, tetapi juga oleh budaya organisasi dan nilai moral aparatur negara. Pemerintahan yang dibangun berdasarkan budaya oriental cenderung mengedepankan pendekatan humanis, harmonisasi sosial, serta orientasi pelayanan publik yang berkeadilan. Dalam konteks tersebut, budaya oriental dapat menjadi strategi penguatan tata kelola pemerintahan dalam mendukung stabilitas kegiatan usaha dan pembangunan nasional. Namun demikian, perkembangan reformasi birokrasi modern saat ini lebih banyak berorientasi pada efisiensi administratif dan digitalisasi pelayanan publik, sementara dimensi budaya dan etika pemerintahan masih relatif kurang mendapat perhatian. Kondisi ini menyebabkan modernisasi birokrasi sering kali belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar seperti korupsi, lemahnya integritas aparatur, dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

SMART Governance dalam Pemerintahan Modern

SMART Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan berbasis budaya oriental melalui pendekatan SMART Governance di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, budaya organisasi, serta penerapan nilai-nilai budaya oriental dalam sistem pemerintahan modern secara lebih komprehensif dan kontekstual. Selain itu, metode ini dinilai mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara budaya oriental, SMART Governance, dan pengembangan ilmu manajemen pemerintahan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi digital.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai konsep ilmu manajemen pemerintahan, budaya oriental, SMART Governance, reformasi birokrasi, serta tata kelola pemerintahan modern di Indonesia. Penelitian deskriptif kualitatif dinilai efektif dalam menjelaskan fenomena sosial dan pemerintahan berdasarkan data teoritis dan empiris yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya oriental diinternalisasikan dalam konsep SMART Governance yang meliputi Self Driven, Motivation, Action, Responsible Regulation, dan Team Accountants dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional, humanis, dan adaptif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku akademik, artikel ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengembangan konsep dan analisis teoritis mengenai hubungan antara budaya oriental, SMART Governance, dan pengembangan ilmu manajemen pemerintahan. Pendekatan ini juga digunakan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat serta mengidentifikasi perkembangan kajian pemerintahan modern, digital governance, dan reformasi birokrasi dalam perspektif budaya organisasi pemerintahan. (Siagian, S. P, 2016).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan ilmu manajemen pemerintahan, budaya oriental, SMART Governance, reformasi birokrasi, digital governance, serta tata kelola pemerintahan modern. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep budaya oriental dalam pemerintahan, strategi pengembangan SMART Governance, reformasi birokrasi digital, kepemimpinan pemerintahan, dan penguatan budaya organisasi aparatur negara.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jurnal ilmiah dan artikel akademik yang membahas manajemen pemerintahan, budaya organisasi, reformasi birokrasi, dan SMART Governance. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku akademik, dokumen kebijakan pemerintah, laporan lembaga nasional dan internasional, serta berbagai referensi lain yang relevan dengan penelitian. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperkuat analisis penelitian dan menghasilkan kajian yang komprehensif mengenai pengembangan ilmu manajemen pemerintahan berbasis budaya oriental melalui pendekatan SMART Governance. (Supriatna, T, 2018).

Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengidentifikasi hubungan antara budaya oriental, SMART Governance, dan strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berintegritas. Analisis dilakukan secara interpretatif untuk memahami relevansi nilai-nilai budaya oriental dalam memperkuat implementasi SMART Governance pada pemerintahan modern di Indonesia. Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber referensi seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen pemerintahan, serta laporan lembaga internasional yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini dilakukan untuk memastikan bahwa data dan hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas, objektivitas, dan keakuratan yang tinggi. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan berbasis budaya oriental melalui SMART Governance dalam mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan modern di Indonesia.

Strategi Pengembangan Ilmu Manajemen Pemerintahan Berbasis Budaya Oriental melalui SMART Governance

Strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan berbasis budaya oriental melalui SMART Governance merupakan upaya membangun sistem tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berintegritas dengan mengintegrasikan nilai budaya bangsa ke dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Dalam konteks pemerintahan modern, pengembangan ilmu manajemen pemerintahan tidak hanya berfokus pada efisiensi administratif dan digitalisasi pelayanan, tetapi juga pada pembangunan karakter aparatur negara, etika pemerintahan, serta penguatan budaya organisasi yang humanis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Budaya oriental dalam pemerintahan menekankan nilai harmoni sosial, moralitas, loyalitas, tanggung jawab kolektif, musyawarah, dan gotong royong sebagai fondasi dalam penyelenggaraan

negara. Nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip SMART Governance yang terdiri dari Self Driven, Motivation, Action, Responsible Regulation, dan Team Accountants. Melalui integrasi kedua pendekatan tersebut, ilmu manajemen pemerintahan diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya modern dan profesional, tetapi juga berlandaskan nilai budaya dan etika pemerintahan Indonesia.

Strategi pertama dilakukan melalui penguatan budaya self driven pada aparatur pemerintahan. Dalam pemerintahan modern, aparatur negara dituntut memiliki inisiatif, kemandirian, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta dinamika sosial masyarakat. Pengembangan ilmu manajemen pemerintahan harus diarahkan pada pembentukan aparatur yang proaktif dan inovatif dalam menyelesaikan persoalan publik. Pendekatan budaya oriental mendukung terciptanya aparatur yang memiliki rasa tanggung jawab moral, loyalitas terhadap negara, serta kesadaran kolektif dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Strategi berikutnya adalah meningkatkan motivasi aparatur pemerintahan melalui penguatan etika pelayanan publik dan budaya kerja yang humanis. Dalam perspektif budaya oriental, motivasi kerja tidak hanya berorientasi pada kepentingan material, tetapi juga pada pengabdian, integritas, dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan ilmu manajemen pemerintahan perlu menekankan pentingnya kepemimpinan yang inspiratif, sistem penghargaan berbasis kinerja, serta pembangunan lingkungan birokrasi yang harmonis dan kolaboratif. Motivasi yang kuat akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas reformasi birokrasi.

Strategi SMART Governance juga menekankan pentingnya action atau tindakan nyata dalam implementasi kebijakan publik. Pengembangan ilmu manajemen pemerintahan harus mampu menghasilkan aparatur yang responsif, cepat, dan solutif dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Dalam pemerintahan modern, keberhasilan birokrasi tidak hanya diukur dari kualitas perencanaan, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, budaya kerja pemerintahan perlu diarahkan pada orientasi hasil (result oriented governance) melalui inovasi pelayanan publik, percepatan birokrasi, dan pemanfaatan teknologi digital secara optimal.

Strategi selanjutnya adalah membangun sistem responsible regulation atau regulasi yang bertanggung jawab, transparan, dan berkeadilan. Dalam konteks SMART Governance, regulasi harus mampu menciptakan kepastian hukum, mendukung stabilitas sosial dan ekonomi, serta melindungi kepentingan masyarakat. Pengembangan ilmu manajemen pemerintahan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap globalisasi dan transformasi digital tanpa mengabaikan nilai budaya dan keadilan sosial. Budaya oriental memberikan fondasi moral dalam pembentukan regulasi yang mengedepankan keseimbangan kepentingan publik, harmoni sosial, dan kesejahteraan bersama.

Strategi terakhir adalah memperkuat team accountants atau kerja sama tim dan akuntabilitas kolektif dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintahan modern membutuhkan koordinasi lintas lembaga, sinergi antar aparatur, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam budaya oriental, nilai gotong royong dan musyawarah menjadi landasan penting dalam menciptakan kolaborasi yang harmonis. Oleh karena itu, pengembangan ilmu manajemen pemerintahan perlu mendorong terciptanya budaya organisasi yang kolaboratif, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kualitas kebijakan pemerintah.

Dalam era digitalisasi, strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan juga perlu diintegrasikan dengan konsep digital governance dan e-government. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi pelayanan publik, serta akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Namun demikian, modernisasi birokrasi harus tetap diimbangi dengan penguatan budaya oriental agar transformasi digital tidak menghilangkan nilai moral, etika pelayanan, dan orientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, SMART Governance menjadi pendekatan yang mampu menghubungkan modernisasi pemerintahan dengan penguatan karakter aparatur negara. Secara keseluruhan, strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan berbasis budaya oriental melalui SMART Governance menjadi pendekatan yang relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi, reformasi birokrasi, dan transformasi digital di Indonesia. Integrasi nilai Self Driven, Motivation, Action, Responsible Regulation, dan Team Accountants diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, humanis, transparan, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan berbasis budaya oriental dalam mewujudkan stabilitas kegiatan usaha di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena tata kelola pemerintahan, budaya organisasi, serta hubungan antara nilai budaya oriental dengan stabilitas kegiatan usaha secara lebih komprehensif dan kontekstual. Selain itu, metode ini dinilai mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran budaya oriental dalam membentuk sistem pemerintahan yang humanis, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan global.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai konsep ilmu manajemen pemerintahan, budaya oriental, good governance, serta stabilitas kegiatan usaha dalam konteks pemerintahan Indonesia. Penelitian deskriptif kualitatif dinilai efektif dalam menjelaskan fenomena sosial dan pemerintahan berdasarkan data teoritis dan empiris yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya oriental diinternalisasikan dalam tata kelola pemerintahan serta pengaruhnya terhadap stabilitas kegiatan usaha nasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku akademik, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengembangan konsep dan analisis teoritis mengenai hubungan antara manajemen pemerintahan, budaya oriental, dan stabilitas kegiatan usaha. Pendekatan ini juga digunakan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat serta mengidentifikasi perkembangan kajian pemerintahan modern dan reformasi birokrasi dalam perspektif budaya. (Siagian, S. P, 2016)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan ilmu manajemen pemerintahan, budaya oriental, good governance, reformasi birokrasi, serta stabilitas kegiatan usaha. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep budaya oriental

dalam pemerintahan, strategi pengembangan manajemen pemerintahan, tata kelola birokrasi modern, serta hubungan pemerintahan dengan stabilitas kegiatan usaha nasional. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jurnal ilmiah dan artikel akademik yang membahas tata kelola pemerintahan, budaya organisasi, dan stabilitas kegiatan usaha. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, dokumen kebijakan pemerintah, laporan lembaga internasional, serta berbagai referensi lain yang relevan dengan penelitian. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperkuat analisis penelitian dan menghasilkan kajian yang komprehensif. (Supriatna, T, 2018)

Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengidentifikasi hubungan antara konsep budaya oriental dan pengembangan ilmu manajemen pemerintahan dalam menciptakan stabilitas kegiatan usaha. Analisis dilakukan secara interpretatif untuk memahami relevansi nilai budaya oriental dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber referensi seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen pemerintahan, dan laporan lembaga internasional yang relevan. Teknik ini dilakukan untuk memastikan bahwa data dan hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas, objektivitas, dan keakuratan yang tinggi. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan berbasis budaya oriental dalam mendukung stabilitas kegiatan usaha dan pembangunan nasional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan globalisasi, revolusi industri 4.0, transformasi digital, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik telah membawa perubahan besar terhadap sistem tata kelola pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif, transparan, responsif, dan berbasis teknologi digital. Dalam konteks tersebut, pengembangan ilmu manajemen pemerintahan menjadi faktor penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi digital juga menuntut pemerintah untuk mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih cepat, terintegrasi, dan inovatif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi. Namun demikian, berbagai persoalan seperti rendahnya integrasi sistem pemerintahan digital, lemahnya kualitas sumber daya manusia aparatur negara, rendahnya integritas birokrasi, serta lemahnya budaya organisasi pemerintahan masih menjadi tantangan utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada modernisasi teknologi, tetapi juga pada penguatan budaya organisasi dan etika pemerintahan. (Syafie, I. K, 2017)

Dalam konteks tersebut, budaya oriental menjadi pendekatan penting dalam pengembangan ilmu manajemen pemerintahan melalui SMART Governance. Budaya oriental yang menekankan nilai moralitas, loyalitas, harmoni sosial, gotong royong, musyawarah, disiplin, dan tanggung jawab

kolektif memiliki relevansi yang kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang humanis dan berintegritas. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi fondasi dalam menciptakan pemerintahan yang tidak hanya efektif secara administratif dan digital, tetapi juga mampu membangun hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi budaya oriental melalui budaya SMART dalam SMART Governance menjadi strategi penting dalam pengembangan ilmu manajemen pemerintahan modern di Indonesia.

Peran Strategis Budaya Oriental dan Budaya SMART dalam Pengembangan Ilmu Manajemen Pemerintahan

Budaya oriental memiliki peran strategis dalam membentuk karakter aparatur negara dan pola kerja birokrasi pemerintahan. Dalam perspektif pemerintahan modern, budaya organisasi menjadi salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas tata kelola pemerintahan. Budaya oriental yang menekankan etika, loyalitas, tanggung jawab, disiplin, dan kebersamaan mampu menciptakan aparatur negara yang lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam penelitian ini, budaya oriental dikembangkan melalui konsep budaya SMART yang terdiri atas Self Driven, Motivation, Action, Responsible Regulation, dan Team Accountants sebagai pendekatan budaya organisasi pemerintahan modern.

Pertama, Self Driven memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab aparatur negara dalam menjalankan tugas pemerintahan. Aparatur negara dituntut memiliki disiplin, inisiatif, serta kemampuan bekerja secara mandiri dan profesional tanpa harus selalu bergantung pada pengawasan birokrasi yang kaku. Dalam konteks SMART Governance, self driven menjadi fondasi dalam menciptakan birokrasi yang responsif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Aparatur negara yang memiliki kesadaran diri tinggi akan lebih mudah mendukung reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan. (Wasistiono, S, 2021)

Kedua, Motivation menjadi faktor penting dalam meningkatkan semangat kerja, produktivitas, dan kualitas pelayanan publik. Budaya oriental menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab moral dan pengabdian kepada negara. Oleh karena itu, motivasi kerja aparatur negara tidak hanya didasarkan pada kepentingan administratif, tetapi juga pada orientasi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam SMART Governance, motivasi kerja yang tinggi akan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan digital dan inovasi pelayanan publik.

Ketiga, Action menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang cepat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintahan modern membutuhkan aparatur negara yang mampu bertindak cepat dalam menyelesaikan persoalan pelayanan publik dan pengambilan kebijakan. Dalam budaya oriental, tindakan nyata mencerminkan tanggung jawab sosial dan loyalitas terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, budaya action dalam SMART Governance dapat mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik berbasis digital.

Keempat, Responsible Regulation memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Regulasi pemerintahan harus dijalankan

secara bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks SMART Governance, regulasi yang bertanggung jawab menjadi dasar dalam menciptakan kepastian hukum, efektivitas birokrasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Budaya oriental yang menekankan moralitas dan etika kepemimpinan dapat memperkuat implementasi regulasi pemerintahan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Kelima, Team Accountants menekankan pentingnya kerja sama, koordinasi, dan akuntabilitas kolektif dalam organisasi pemerintahan. Pemerintahan modern tidak dapat berjalan secara individualistik karena penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan kolaborasi antar lembaga, aparatur negara, dan masyarakat. Dalam budaya oriental, nilai gotong royong dan musyawarah menjadi dasar dalam membangun kerja sama sosial yang harmonis. Oleh karena itu, budaya Team Accountants dalam SMART Governance mampu memperkuat koordinasi birokrasi, integrasi sistem pemerintahan digital, dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Strategi Pengembangan Ilmu Manajemen Pemerintahan melalui SMART Governance

Generasi Pengembangan ilmu manajemen pemerintahan menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern dan transformasi digital. Pemerintah dituntut mampu membangun sistem birokrasi yang profesional, inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi digital. Pertama, reformasi birokrasi menjadi strategi utama dalam pengembangan ilmu manajemen pemerintahan melalui SMART Governance. Reformasi birokrasi tidak hanya berorientasi pada penyederhanaan administrasi dan digitalisasi pelayanan publik, tetapi juga pada pembangunan budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan publik. Pemerintahan yang efektif akan menciptakan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Kedua, digitalisasi pemerintahan menjadi bagian penting dalam modernisasi tata kelola pemerintahan. Implementasi e-government, integrasi data digital, artificial intelligence, serta sistem pelayanan berbasis teknologi mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi pemerintahan. SMART Governance mendorong pemerintah untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Namun demikian, digitalisasi pemerintahan harus tetap diimbangi dengan penguatan etika pelayanan dan budaya organisasi agar modernisasi birokrasi tidak kehilangan orientasi pada kepentingan publik. (Widodo, J, 2020)

Ketiga, penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara menjadi strategi penting dalam pengembangan ilmu manajemen pemerintahan. Aparatur negara harus memiliki kompetensi teknologi digital, kemampuan inovasi, serta integritas moral dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam konteks budaya SMART, pembangunan karakter aparatur negara menjadi bagian penting dalam menciptakan birokrasi yang humanis dan profesional. Penguatan kompetensi aparatur negara juga diperlukan agar implementasi SMART Governance dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Keempat, penguatan integrasi sistem pemerintahan digital menjadi strategi penting dalam mendukung efektivitas SMART Governance. Pemerintah perlu menciptakan sistem data yang terintegrasi antar lembaga agar pelayanan publik menjadi lebih efisien dan transparan. Integrasi sistem

digital juga dapat mempercepat proses pengambilan kebijakan dan meningkatkan koordinasi birokrasi pemerintahan.

Kelima, penguatan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam pengembangan SMART Governance. Pemerintahan modern harus mampu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pengawasan pelayanan publik. Dalam budaya oriental, musyawarah dan kebersamaan menjadi prinsip penting dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dapat memperkuat legitimasi kebijakan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Keenam, penguatan budaya organisasi pemerintahan menjadi strategi penting dalam menghadapi tantangan modernisasi birokrasi. Modernisasi pemerintahan yang tidak disertai pembangunan budaya organisasi dan etika aparatur negara berpotensi menciptakan birokrasi yang kehilangan orientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi budaya oriental melalui budaya SMART dapat menjadi fondasi moral dalam pengembangan ilmu manajemen pemerintahan modern di Indonesia.

Tantangan Pengembangan Ilmu Manajemen Pemerintahan melalui SMART Governance

Meskipun SMART Governance memiliki relevansi yang kuat dalam tata kelola pemerintahan modern, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur negara dalam pemanfaatan teknologi digital. Banyak aparatur negara yang masih belum mampu beradaptasi secara optimal terhadap transformasi digital pemerintahan sehingga implementasi SMART Governance belum berjalan secara maksimal.

Selain itu, kesenjangan infrastruktur teknologi dan lemahnya integrasi sistem pemerintahan digital juga menjadi hambatan dalam pengembangan SMART Governance. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai sehingga kualitas pelayanan publik berbasis digital masih belum merata. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas digitalisasi pemerintahan masih menghadapi berbagai kendala.

Tantangan lainnya adalah resistensi birokrasi terhadap perubahan budaya kerja dan modernisasi pemerintahan. Sebagian aparatur negara masih mempertahankan pola birokrasi konvensional yang lambat, administratif, dan kurang inovatif. Kondisi ini dapat menghambat implementasi budaya SMART dalam tata kelola pemerintahan modern.

Di sisi lain, rendahnya integritas birokrasi dan masih tingginya praktik korupsi juga menjadi tantangan serius dalam pengembangan ilmu manajemen pemerintahan berbasis SMART Governance. Modernisasi teknologi tanpa diimbangi penguatan moral dan etika aparatur negara berpotensi menciptakan penyalahgunaan kewenangan dalam sistem pemerintahan digital. Oleh karena itu, budaya oriental menjadi sangat penting sebagai fondasi moral dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pelayanan publik.

Secara keseluruhan, strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan berbasis budaya oriental melalui pendekatan SMART Governance memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, humanis, transparan, adaptif, dan berintegritas. Integrasi budaya SMART yang terdiri atas Self Driven, Motivation, Action, Responsible Regulation, dan Team Accountants mampu menjadi fondasi budaya organisasi pemerintahan dalam mendukung reformasi

birokrasi dan transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Namun demikian, implementasinya memerlukan dukungan penguatan sumber daya manusia aparatur negara, pembangunan budaya organisasi pemerintahan, integrasi sistem digital, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar SMART Governance dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan berbasis budaya oriental melalui pendekatan SMART Governance merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan globalisasi, transformasi digital, serta tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan humanis. Pendekatan SMART Governance yang mengintegrasikan nilai Self Driven, Motivation, Action, Responsible Regulation, dan Team Accupants mampu menciptakan sistem pemerintahan yang tidak hanya berbasis teknologi dan inovasi, tetapi juga berorientasi pada nilai moral, etika pelayanan, tanggung jawab sosial, dan kolaborasi kelembagaan. Dalam konteks tersebut, budaya oriental memiliki relevansi yang kuat karena menekankan nilai harmoni sosial, gotong royong, loyalitas, disiplin, musyawarah, dan kepentingan bersama sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Lebih lanjut, pengembangan ilmu manajemen pemerintahan melalui SMART Governance memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, transparansi pemerintahan, serta integrasi sistem digital pemerintahan. Nilai Self Driven dan Motivation mendorong aparatur negara untuk bekerja secara profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Sementara itu, nilai Action dan Responsible Regulation memperkuat efektivitas kebijakan, kepastian hukum, serta akuntabilitas pemerintahan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Selain itu, nilai Team Accupants memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi budaya oriental dan SMART Governance dapat menciptakan pemerintahan yang modern namun tetap berakar pada identitas budaya bangsa Indonesia.

Namun demikian, implementasi strategi pengembangan ilmu manajemen pemerintahan berbasis budaya oriental melalui SMART Governance juga menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur negara, kesenjangan literasi digital, resistensi birokrasi terhadap perubahan, lemahnya integrasi sistem pemerintahan digital, serta menurunnya internalisasi nilai budaya dan etika dalam birokrasi modern. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan strategi yang adaptif dan berkelanjutan melalui reformasi birokrasi, penguatan budaya organisasi, peningkatan kompetensi digital aparatur negara, serta pembangunan karakter pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik. Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan SMART Governance berbasis budaya oriental tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, humanis, inovatif, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2015). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Pustaka Pelajar.
- Atmosudirdjo, P. (1982). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Ghalia Indonesia.
- Ali, F. (2017). *Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. RajaGrafindo Persada.
- Agustino, L. (2019). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Effendi, S. (2019). *Reformasi Tata Pemerintahan*. LP3ES.
- Fukuyama, F. (2013). What Is Governance?. *Governance*, 26(3), 347–368.
<https://doi.org/10.1111/gove.12035>
- Huntington, S. P. (2006). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- Handyaningrat, S. (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung.
- Hardjosoekarto, S. (2014). *Governance dan Penguatan Institusi Pemerintahan*. RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaruan.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Pasolong, H. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2017). *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti. (2018). *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Mandar Maju.
- Siagian, S. P. (2016). *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara.
- Supriatna, T. (2018). *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Nusa Media.
- Syafiie, I. K. (2017). *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju.
- Wasistiono, S. (2021). *Perkembangan Ilmu Pemerintahan: Dari Klasik Sampai Kontemporer*. IPDN Press.
- Widodo, J. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.
- Transparency International. (2025). *Corruption Perceptions Index 2025*. Transparency International.
- United Nations Development Programme. (2022). *Governance for Sustainable Development*. United Nations Development Programme.
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. World Bank.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.